



## **KINERJA BENDAHARA DALAM AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PADA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DI KANTOR KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

**Muhamad Saifullah<sup>1</sup>, Dewi Cahyawati Abdullah<sup>2</sup>, Nora Ariani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pancamarga  
Palu  
e-mail : [muhamadsaifullah86@gmail.com](mailto:muhamadsaifullah86@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[dewi.4bd@gmail.com](mailto:dewi.4bd@gmail.com)<sup>2</sup>, [hajirrr110@gmail.com](mailto:hajirrr110@gmail.com)<sup>3</sup>

Penulis Korespondensi. Nama Lengkap Penulis  
e-mail : [muhamadsaifullah86@gmail.com](mailto:muhamadsaifullah86@gmail.com)

### **ARTIKEL INFO**

*Artikel History:*

*Menerima: 4 April 2025*

*Revisi: 17 April 2025*

*Diterima: 25 April 2025*

**Kata kunci :**

Kinerja, Pelaporan Keuangan,  
Akuntabilitas, Hubungan  
Masyarakat

### **A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja bendahara dalam akuntabilitas pelaporan keuangan pada Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Akuntabilitas pelaporan keuangan menjadi aspek penting dalam transparansi dan pengelolaan anggaran di instansi kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan lima informan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pencatatan, reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas keuangan telah diterapkan dengan adanya mekanisme pengawasan internal, kelengkapan dokumen pendukung, serta verifikasi berlapis untuk memastikan transparansi. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pencatatan akibat birokrasi yang kompleks serta efisiensi sistem monitoring yang perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, sistem akuntabilitas keuangan di Bidhumas Polda Sulteng telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan optimalisasi dalam aspek efisiensi dan aksesibilitas data. Digitalisasi sistem pelaporan keuangan dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pencatatan dan verifikasi, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

### **ARTICLE INFO**

*Artikel History:*

Recived 4 April 2025

Revision 17 April 2025

Accepted 25 April 2025

**Keywords :**

Performance, Financial  
Reporting, Accountability,  
Public Relations

### **A B S T R A C K**

This study aims to analyze the treasurer's performance in financial reporting accountability in the Public Relations Division of the Central Sulawesi Regional Police. Financial reporting accountability is crucial for transparency and budget management in law enforcement institutions. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through observations, interviews with five informants, and documentation. Data analysis was conducted through recording, reduction, presentation, verification, and conclusion drawing. The findings indicate that financial accountability has been implemented through internal supervision mechanisms, supporting document completeness, and layered verification to ensure transparency. However, challenges remain, such as delays in record-keeping due to complex bureaucracy and the need for more efficient monitoring systems. In conclusion, financial accountability in the Public Relations Division of the Central Sulawesi Regional Police is functioning well but requires optimization in efficiency and data accessibility. Digitalizing the financial reporting system could be a solution to accelerate

the recording and verification process, thereby enhancing transparency and effectiveness in budget management.

© 2025 Strategic: Journal of Management Sciences. All rights reserved.

---

## 1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi sektor publik, termasuk institusi kepolisian. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya menciptakan transparansi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana publik (Mardiasmo, 2021). Polri, sebagai institusi negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, dituntut untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Negara di Lingkungan Polri, yang mengatur bahwa setiap satuan kerja Polri harus menjalankan fungsi pengawasan dan pelaporan keuangan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, peran bendahara menjadi sangat penting karena memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun laporan keuangan, mengelola alokasi anggaran, serta memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Suparji, 2019). Bendahara bukan hanya berperan sebagai pengelola teknis anggaran, tetapi juga sebagai penjaga akuntabilitas keuangan di tingkat satuan kerja. Profesionalisme dan kompetensi bendahara sangat menentukan kualitas pelaporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada citra dan kredibilitas institusi Polri dalam pengelolaan dana publik (Mahmudi, 2005).

Dalam Rencana Strategi Pusat Keuangan (Puskeu) Polri tahun 2020–2024, terdapat komitmen untuk memaksimalkan kompetensi SDM di aspek keuangan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi serta sistem keuangan modern yang terus berkembang. Komitmen ini sejalan dengan Program Prioritas Kapolri yang menekankan pentingnya pengembangan SDM Polri dalam era Police 4.0, di mana aspek digitalisasi dan modernisasi sistem keuangan menjadi kebutuhan mendesak (Heri, 2019). Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan dalam proses regenerasi dan kaderisasi bendahara satuan kerja yang berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan di lingkungan Polri. Puskeu Polri menghadapi kesulitan ketika menemukan dan menentukan bendahara pengganti bagi personel yang memasuki masa pensiun, terkena mutasi, atau menghadapi sanksi disiplin. Proses regenerasi yang tidak sistematis ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas akuntabilitas keuangan di lingkungan Polri, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ketiadaan sistem kaderisasi yang jelas juga berdampak pada kurangnya motivasi anggota Polri untuk mengisi posisi bendahara karena jabatan ini dianggap memiliki beban tanggung jawab yang berat tanpa insentif yang sepadan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Namun, penelitian yang secara spesifik membahas peran dan kinerja bendahara dalam akuntabilitas pelaporan keuangan di institusi kepolisian masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian yang ada lebih berfokus pada aspek akuntabilitas sektor publik secara umum atau efektivitas pengelolaan keuangan di kementerian dan lembaga negara lainnya. Selain itu, meskipun terdapat penelitian mengenai sistem pengelolaan keuangan dalam institusi pemerintah, kajian mengenai mekanisme regenerasi dan kaderisasi bendahara dalam sistem kepolisian belum banyak dibahas dalam literatur akademik. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian akademik dan praktik pengelolaan keuangan di institusi kepolisian. Penelitian ini mengembangkan model kaderisasi dan regenerasi bendahara berbasis kompetensi dan sertifikasi yang belum banyak diterapkan di lingkungan Polri. Model ini bertujuan untuk

menciptakan sistem kaderisasi yang lebih sistematis sehingga setiap satuan kerja memiliki bendahara yang berkompeten dan profesional (Sidabutar, 2020). Selain itu, penelitian ini mengkaji aspek-aspek yang memberi dampak pada efektivitas regenerasi bendahara, khususnya dalam aspek kebijakan, pelatihan, dan insentif bagi bendahara yang berprestasi. Dengan mengacu pada praktik terbaik dalam akuntabilitas keuangan sektor publik, penelitian ini membandingkan sistem kaderisasi bendahara Polri dengan praktik di kementerian dan lembaga keuangan negara lainnya untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat kapasitas bendahara di lingkungan Polri, penelitian ini juga mengusulkan implementasi program pendidikan dan pelatihan calon bendahara yang berkelanjutan. Saat ini, sebagai langkah awal, telah dikerjakan koordinasi dan konsolidasi dengan Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kemenkeu RI guna melaksanakan kerja sama dalam bentuk pilot project Diklat calon bendahara. Dengan cara demikian, diharapkan para pengambil kebijakan di lingkungan Polri menyadari begitu krusialnya sistem regenerasi dan kaderisasi bendahara pengeluaran pada satuan kerja Polri. Berbagai prestasi tersebut adalah hasil dari upaya dan program jangka pendek dan menengah. Diproyeksikan dalam jangka panjang, upaya pendidikan dan pelatihan calon bendahara di lingkungan Polri dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dengan maksud bahwa seluruh satuan kerja di lingkungan Polri memiliki minimal satu orang calon bendahara yang telah memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) (Indah et al., 2022).

Dalam rangka mengoptimalkan kompetensi calon bendahara, diperlukan pelaksanaan Diklat calon bendahara pengeluaran di Polri dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan personel dalam bidang perbendaharaan dan keuangan serta memberikan pengakuan dari negara dalam bentuk sertifikasi sebagai syarat utama bagi personel untuk diangkat menjadi bendahara pengeluaran (Ridwan, 2018). Sebagai upaya meningkatkan motivasi bendahara, daam studi Idawati (2019) penting untuk diberikan insentif dalam bentuk penghargaan dan pengakuan. Salah satu usulan yang telah diajukan adalah pemberian reward dari Kapolri kepada para bendahara yang berprestasi dalam bentuk kesempatan mengikuti Sekolah Inspektur Polisi (SIP) kuota khusus keuangan dan Perwira Alih Golongan (PAG) khusus. Melalui sekolah khusus kuota keuangan bagi bendahara, diupayakan personel semakin termotivasi untuk mengambil peran sebagai bendahara tanpa harus dipaksa.

## **2. STUDI LITERATUR**

### *2.1 Konsep Kinerja*

Dalam suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta, keberhasilan pencapaian tujuan sangat bergantung pada kinerja individu dan kelompok dalam organisasi tersebut (Judge & Robbins, 2017). Kinerja menjadi ukuran utama efektivitas dan efisiensi organisasi untuk meraih capaian yang sudah ditentukan dalam batas waktu tertentu (Mangkunegara, 2011). Dalam konteks organisasi kepolisian, kinerja menjadi aspek fundamental dalam memastikan pelaksanaan tugas yang optimal dan akuntabel, terutama dalam bidang keuangan, yang berperan dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Keban, 2019). Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja yang diraih oleh individu atau kelompok individu berdasarkan standar keberhasilan tertentu. Mangkunegara (2011) mengartikan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Bernardin dan Russel (dalam Keban, 2019) menyatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui beberapa kriteria, antara lain kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efisiensi biaya, serta tingkat kemandirian dalam bekerja.

Dalam lingkungan Polri, penilaian kinerja tidak hanya didasarkan pada pencapaian target, namun juga pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip serta ketentuan internal institusi yang berlaku. Hal ini tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Polri yang menegaskan bahwa setiap pengelolaan keuangan harus menjunjung tinggi asas akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mengatur bahwa seluruh anggota Polri wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, termasuk dalam aspek administratif dan keuangan. Dengan demikian, kinerja bendahara dalam pelaporan keuangan di satuan kerja seperti Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah harus dilihat dari sejauh mana ia melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Polri yang berlaku, selain dari hasil kerja itu sendiri (Dharma, 2005; Hasibuan, 2016).

## 2.2 Kinerja Bendahara dalam Organisasi Publik

Dalam organisasi kepolisian, peran bendahara memiliki kedudukan yang strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan negara. Menurut Keban (2019), pengelolaan keuangan di sektor publik harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem kaderisasi dan regenerasi bendahara dalam organisasi kepolisian masih belum optimal, sehingga dapat menghambat kesinambungan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan publik (Pramudya, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh As'syifa (2022) menemukan bahwa banyaknya pergantian bendahara dalam instansi pemerintahan sering kali menyebabkan penurunan kinerja keuangan karena minimnya transfer pengetahuan dan kompetensi antarpersonel. Hal ini juga diperkuat oleh studi Nawir, Abduh dan Setiawan (2024) yang menyatakan bahwa regenerasi dalam jabatan keuangan publik harus didukung oleh pelatihan yang berkesinambungan dan sistem pengawasan yang ketat. Namun, dalam konteks Polri, program pelatihan bendahara pengeluaran belum terstruktur dengan baik, sehingga masih terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan di antara personel yang menjabat sebagai bendahara.

## 2.3 Research Gap, Novelty, dan Alur Pemikiran Penelitian

Berdasarkan berbagai studi sebelumnya, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam pengelolaan kinerja bendahara di lingkungan kepolisian, khususnya dalam aspek regenerasi dan kaderisasi. Sebagian besar penelitian yang ada hanya membahas aspek manajerial pengelolaan keuangan di sektor publik secara umum, namun belum secara spesifik menyoroti mekanisme regenerasi dan peningkatan kompetensi bendahara dalam institusi kepolisian (Suparji, 2019; Mahmudi, 2005). Tingginya tingkat pergantian bendahara yang tidak diiringi pelatihan sistematis menyebabkan munculnya permasalahan dalam efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang berfokus pada pengembangan sistem kaderisasi bendahara dalam Polri melalui pelatihan yang terstruktur dan berbasis sertifikasi. Dengan adanya program pendidikan dan pelatihan calon bendahara yang berkelanjutan, diharapkan akan terbentuk mekanisme kaderisasi yang lebih sistematis, sehingga setiap satuan kerja memiliki minimal satu bendahara yang tersertifikasi dengan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional (Mardiasmo, 2021). Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan insentif berupa reward dalam bentuk jenjang karier yang lebih jelas bagi bendahara yang berprestasi, yang selama ini belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya (Hasibuan, 2016).

Alur pemikiran dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi pentingnya kinerja bendahara dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam organisasi kepolisian. Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan adalah kompetensi bendahara, yang meliputi aspek keterampilan teknis, pemahaman regulasi, serta pengalaman kerja (Mangkunegara, 2011; Judge & Robbins, 2017). Namun, dalam praktiknya, sistem kaderisasi bendahara di Polri belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya standar

prosedur pelatihan dan jenjang pengembangan karier yang sistematis untuk posisi bendahara. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menganalisis efektivitas program pelatihan bendahara yang telah diterapkan di berbagai satuan kerja Polri serta mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasinya. Dari hasil analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem kaderisasi bendahara di lingkungan Polri (Dharma, 2005; Keban, 2019). Dengan mengatasi kesenjangan penelitian yang ada, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan kepolisian.

### 3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada makna di balik suatu fakta. Pendekatan kualitatif condong kepada studi yang bersifat naturalistik, fenomenologis, dan etnografi (Satori & Komariah, 2009). Metode penelitian kualitatif diimplementasikan pada studi yang berfokus pada kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, analisis yang bersifat induktif, dan hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji berdasarkan kriteria kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah dengan pemilihan lokasi secara purposive. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut mudah dijangkau dan efisien dalam aspek waktu dan biaya, serta tersedianya data yang relevan, baik primer maupun sekunder, yang dapat mendukung penelitian. Selain itu, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang kinerja bendahara dalam akuntabilitas pelaporan keuangan di instansi tersebut. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Arikunto, 2010). Observasi dilakukan dengan pendekatan non-partisipatif, di mana peneliti hanya melakukan pencatatan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap informasi yang diberikan oleh informan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi, laporan keuangan, regulasi, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan, dengan mempertimbangkan kredibilitas dan konfirmabilitas data. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan berbagai sumber data untuk memperoleh informasi yang lebih akurat.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Temuan

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan terkait, penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa aspek penting yang memengaruhi proses akuntabilitas keuangan di lingkungan Polda Sulawesi Tengah. Aspek-aspek tersebut mencakup mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran, tantangan terkait keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, serta efektivitas sistem monitoring keuangan yang digunakan. Uraian berikut akan mengelaborasi lebih lanjut temuan-temuan utama yang ditemukan dalam penelitian ini, yang memberikan gambaran mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pihak terkait dalam mengelola akuntabilitas keuangan.

### 3.1.1 Memberikan Pertanggungjawaban

Wawancara dengan Kabidhumas Polda Sulteng menunjukkan bahwa terdapat mekanisme internal yang memastikan setiap laporan keuangan dapat diverifikasi dan ditelusuri kembali. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Kabidhumas Polda Sulteng menyatakan:

“Sebagai kepala bidang, saya selalu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami memiliki mekanisme internal yang memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang disampaikan dapat diverifikasi dan ditelusuri kembali untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan.”

Pernyataan ini diperkuat oleh Kasubbag Renmin yang menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus disertai dokumen pendukung guna meminimalkan risiko kesalahan dalam audit internal maupun eksternal: “Dalam bidang perencanaan dan administrasi, pertanggungjawaban keuangan menjadi prioritas utama kami. Setiap kali ada pengeluaran, kami memastikan ada dokumen pendukung yang lengkap sebelum laporan disampaikan ke atasan. Dengan sistem ini, kami bisa mengurangi risiko temuan dalam audit internal maupun eksternal.”

### 3.1.2 Keterlambatan dalam Penyusunan Laporan

Dalam wawancara dengan Bamin Subbid PID, ditemukan bahwa pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara sistematis. Namun, terdapat kendala ketika terjadi perubahan mendadak dalam kegiatan yang menyebabkan pergeseran anggaran. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan tugas saya, saya harus memastikan bahwa semua pengeluaran terkait dokumentasi dan publikasi kegiatan kepolisian sesuai dengan anggaran yang tersedia. Setiap transaksi dicatat dengan baik dan kami selalu siap jika ada pemeriksaan atau audit dari pihak berwenang.” Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa kendala utama yang dihadapi adalah fleksibilitas pengelolaan anggaran ketika terjadi perubahan kegiatan yang membutuhkan realokasi dana.

### 3.1.3 Sistem Monitoring Keuangan

Bamin Subbid Penmas menyoroti bahwa sistem monitoring keuangan telah diterapkan guna memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran. Namun, masih terdapat kendala dalam optimalisasi sistem, khususnya dalam hal efisiensi dan aksesibilitas data secara real-time:

“Kami selalu mendokumentasikan setiap pengeluaran yang kami lakukan. Dengan adanya sistem monitoring keuangan, kami bisa memastikan bahwa setiap dana yang keluar digunakan sesuai dengan kebutuhannya dan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.”

Meskipun sistem monitoring keuangan telah berjalan, masih terdapat hambatan dalam kecepatan input data ke sistem, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan secara *real-time*. Berdasarkan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban dan monitoring keuangan di Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam fleksibilitas pengelolaan anggaran dan percepatan akses data.

## 3.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Sari (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan dalam institusi pemerintahan sangat bergantung pada mekanisme verifikasi internal yang ketat. Adanya mekanisme ini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi keuangan instansi pemerintahan. Selain itu, penelitian oleh Ternalemta, Kalangi dan Tinangon (2021) menunjukkan bahwa keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan sering terjadi akibat birokrasi yang memerlukan kelengkapan dokumen sebelum laporan diajukan. Hal

ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana proses verifikasi dokumen memperlambat penyelesaian laporan keuangan.

Dalam konteks sistem monitoring keuangan, penelitian Amelia (2023) menegaskan bahwa digitalisasi dalam pelaporan keuangan dapat mengurangi kesalahan manusia (*human error*) serta meningkatkan efisiensi dalam audit keuangan. Temuan ini relevan dengan penelitian ini yang menemukan bahwa sistem monitoring keuangan telah diterapkan tetapi masih membutuhkan optimalisasi dalam kecepatan akses dan fleksibilitas data (Gautama & Arfan, 2010). Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Musri *et al.* (2024) yang menyebutkan bahwa dalam instansi pemerintah, transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat ditingkatkan dengan mekanisme audit yang ketat dan penerapan teknologi informasi dalam pencatatan keuangan.

Namun, mereka juga menyoroti bahwa sistem pencatatan digital sering mengalami kendala dalam hal kecepatan dan aksesibilitas data, yang sesuai dengan hasil wawancara dengan Bamin Subbid Penmas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan ini, disarankan agar dilakukan penguatan sistem digitalisasi dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan anggaran untuk menghindari keterlambatan pelaporan akibat perubahan mendadak dalam kegiatan operasional.

#### **4 KESIMPULAN**

Berlandaskan pada analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan pada Bidhumas Polda Sulawesi Tengah telah dijalankan dengan mekanisme yang memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap pengeluaran. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal, kelengkapan dokumen, serta proses verifikasi yang ketat berkontribusi terhadap efektivitas pelaporan keuangan. Namun, tantangan seperti keterlambatan dalam proses pencatatan akibat birokrasi serta kebutuhan optimalisasi sistem monitoring masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan efisiensi dalam sistem akuntabilitas keuangan, termasuk melalui penerapan digitalisasi dalam pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas teknologi keuangan dalam meningkatkan kinerja akuntabilitas di institusi pemerintahan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih diberikan pada pihak-pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, khususnya Bidang Hubungan Masyarakat, yang telah mengizinkan dan dukungan selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada para informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dan wawasan berharga. Selain itu, apresiasi diberikan kepada rekan-rekan serta pihak akademik yang telah memberikan rekomendasi dan saran dalam penyusunan studi ini. Besar harapannya hasil studi ini bisa menambah manfaat bagi pengembangan akuntabilitas keuangan di institusi kepolisian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, B. (2023). *Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara Di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh*. IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12581>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. In (*No Title*). Rineka Cipta.
- As'syifa, N. (2022). *Analisis efektivitas pengguna aplikasi sakti: Integrasi pengelolaan*

- keuangan dan laporan pertanggungjawaban (Studi kasus di satuan kerja deputy bidang perlindungan khusus anak). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.* <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/9090>
- Dharma, S. (2005). *Manajemen kinerja falsafah teori dan penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Gautama, I., & Arfan, M. (2010). Pengaruh Kepuasan Kerja, Profesionalisme, Dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 195–205.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Heri, E. I. (2019). Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 16. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i2.159>
- Idawati, W. (2019). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2), 153–172. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>
- Indah, H. R., Satrya, A., & Lestari, E. P. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Employee Engagement Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 350–361. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1190>
- Judge, T. A., & Robbins, S. P. (2017). *Essentials of organizational behavior* (Vol. 3). Pearson Education (us).
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Gava Media. <https://books.google.co.id/books?id=vx3wzweACAAJ>
- Mahmudi, M. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.*
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2011). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi Offset. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- Musri, M., Pasaribu, F. R., Khudri, N., Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Administrasi Negara. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 8888–8893. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.30320>
- Nawir, M., Abduh, T., & Setiawan, L. (2024). Analisis Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Anggota Polri Melalui Penguasaan Teknologi Pada Kantor Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Business and Management*, 7(1), 69–75.
- Pramudya, H. (2023). Penerapan Program Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Salam Presisi*, 1(02), 111–134.
- Ridwan, D. P. (2018). Reformasi Birokrasi Polri Dalam Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kepolisian daerah sulawesi selatan. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 15(3).
- Sari, D. (2012). Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis*, 718–727.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Sidabutar, V. T. P. (2020). Kajian Penerapan Corporate University dalam Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 255–270. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.814>
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. In *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung* (Vol. 225, Issue 87).
- Suparji, S. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Sistem Pengelolaan Keuangan



Daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1–5.  
<https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>

Ternalemta, T., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 12(1), 38–50.  
<https://doi.org/10.35800/jjs.v12i1.32359>